



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANA SURYANA,ST.M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 4 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**DPPA TA-2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	44
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	22

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	36.762.908.280	PAPBD
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.993.088.280	PAPBD
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.480.339.000	PAPBD
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.289.481.000	PAPBD
	JUMLAH	36.762.908.280	

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

NANA SURYANA, ST.M.Si.
NIP. 19710624 199803 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Massaputro Delly TP, S.Sos., M.Si.

Jabatan : SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nana Suryana, S.T., M.Si.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Nana Suryana, S.T., M.Si.
NIP: 19710624 199803 1 006

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Pertama,

Massaputro Delly TP, S.Sos., M.Si.
NIP: 19740604 199302 1 001

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paundra Bayyu Ajie, A.P., M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nana Suryana, S.T., M.Si.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,

Nana Suryana, S.T., M.Si.
NIP: 19710624 199803 1 006

Pihak Pertama,

Paundra Bayyu Ajie, A.P., M.Si.
NIP: 19760923 199412 1 001

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	persen	100,00	100,00



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Setiawandi Hakim, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nana Suryana, S.T., M.Si.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,

Nana Suryana, S.T., M.Si.
NIP: 19710624 199803 1 006

Pihak Pertama,

Dr. Setiawandi Hakim, S.H., M.H.
NIP: 19720404 199601 1 001

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	100,00	100,00



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nana Suryana, S.T., M.Si.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,

Nana Suryana, S.T., M.Si.
NIP: 19710624 199803 1 006

Pihak Pertama,

Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.M.
NIP: 19770607 199102 1 001

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	5
Sasaran Program					
1	Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	Persen	100,00	100,00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.M.

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nana Suryana, S.T., M.Si.

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,

Nana Suryana, S.T., M.Si.
NIP: 19710624 199803 1 006

Pihak Pertama,

Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.M.
NIP: 19770607 199102 1 001

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Program				
1	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Persen	100,00

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Nana Suryana, S.T., M.Si.
NIP: 19710624 199803 1 006

Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran



Ade Syarif Hidayatullah, S.STP., M.M.
NIP: 19710624 199803 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ipan Mochamad Imron A, S.H., M.Si.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Massaputro Delly TP, S.Sos., M.Si.


Jabatan : SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

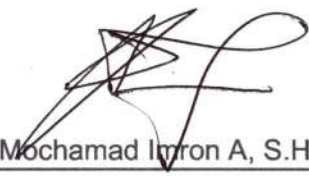
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Massaputro Delly TP, S.Sos., M.Si.
NIP: 19740604 199302 1 001

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Pertama,


Ipan Mochamad Imron A, S.H., M.Si.
NIP: 19700921 200112 2 004

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
Sasaran Kegiatan					
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	100,00
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
8	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	4,00
9	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00
10	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00
11	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00
12	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00
13	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	24,00	24,00
14	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	4,00
15	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2,00	2,00
16	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1,00	1,00
17	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12,00	12,00


No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
18	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	12,00
19	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	12,00
20	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	12,00
21	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00
22	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	1,00
23	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	12,00
24	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00
25	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	1,00
26	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100,00	100,00
27	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	1,00
28	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00
29	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00
30	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokuman	12,00	12,00
31	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25,00	38,00
32	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00
33	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	34,00	47,00
34	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14,00	82,00
35	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
------	--	---------------------------------	---------------------------------


Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.825.456.380,00	31.993.088.280,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.825.456.380,00	31.993.088.280,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.993.088.280,00	31.993.088.280,00
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.840.000,00	214.383.600,00
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.557.000,00	25.557.000,00
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.700.000,00	3.700.000,00
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.700.000,00	3.700.000,00
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.350.000,00	26.350.000,00
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.850.400,00	106.720.000,00
1.05.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	18.682.600,00	18.682.600,00
1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	24.674.000,00
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.601.206.230,00	23.015.560.000,00
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.376.001.230,00	22.730.200.000,00
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.205.000,00	264.360.000,00
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000,00	5.000.000,00
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	5.000.000,00
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000,00	2.000.000,00
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	5.000.000,00
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000,00	2.000.000,00
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	70.100.000,00
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000,00	1.000.000,00
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	69.100.000,00
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	662.900.000,00	385.596.700,00
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	5.352.000,00
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.900.000,00	357.444.700,00
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	330.000.000,00	12.800.000,00
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	511.202.000,00	191.499.740,00
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	511.202.000,00	191.499.740,00
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.939.308.150,00	7.075.675.240,00
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.939.308.150,00	7.075.675.240,00
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.000.000,00	1.040.273.000,00
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	780.000.000,00	928.367.000,00
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	61.906.000,00
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
TOTAL ANGGARAN Rp.		35.825.456.380,00	31.993.088.280,00

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja


Massaputro Dedy TR, S.Sos., M.Si.
NIP: 19740604 199302 1 001

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


Ipan Mochamad Inron A, S.H., M.Si.
NIP: 19700921 200112 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Pusparani, S.STP., M.A.P.

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Paundra Bayyu Ajie, A.P., M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

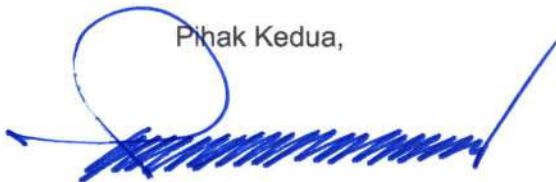
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Paundra Bayyu Ajie, A.P., M.Si.
NIP: 19760923 199412 1 001

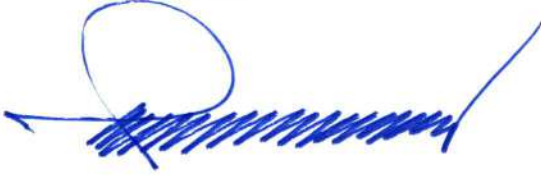

Indah Pusparani, S.STP., M.A.P.
NIP: 19840812 200212 2 001

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
Sasaran Kegiatan					
1	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Ketercapaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
2	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4,00	1,00
3	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	1,00	1,00
4	Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1,00	1,00
5	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengam	laporan	12,00	12,00
6	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa da	Laporan	12,00	12,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	708.451.000,00	932.251.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	708.451.000,00	932.251.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	932.251.000,00	932.251.000,00
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	708.451.000,00	932.251.000,00
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	38.000.000,00	38.000.000,00
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	235.000.000,00	356.800.000,00
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	415.451.000,00	517.451.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
	TOTAL ANGGARAN Rp.	708.451.000,00	932.251.000,00

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum



Paundra Bayyu Ajie, A.P., M.Si.
NIP: 19760923 199412 1 001

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum



Indah Pusparani, S.STP., M.A.P.
NIP: 19840812 200212 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Lalan Suherlan

Jabatan : KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Paundra Bayyu Ajie, A.P., M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,

Paundra Bayyu Ajie, A.P., M.Si.

NIP: 19760923 199412 1 001

Pihak Pertama,

Drs. Lalan Suherlan

NIP: 19690210 200112 1 002

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
Sasaran Kegiatan					
1	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Ketercapaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	30,00	30,00
3	Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Dokumen	1,00	1,00
4	Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	15,00	3,00
5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	200,00	200,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	734.200.000,00	486.516.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	734.200.000,00	486.516.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	486.516.000,00	486.516.000,00
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	734.200.000,00	486.516.000,00
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Peindungan Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	619.200.000,00	371.516.000,00
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000,00	100.000.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		734.200.000,00	486.516.000,00

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Paundra Bayyu Ajie, A.P., M.Si.
NIP: 19760923 199412 1 001

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM

Drs. Lalan Suherlan
NIP: 19690210 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohmawati, S.Ag., M.Si.

Jabatan : KEPALA SEKSI PENANGANAN PELANGGARAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Setiawandi Hakim, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Pertama,

Rohmawati, S.Ag., M.Si.

NIP: 19730613 200112 2 003

Pihak Kedua,

Dr. Setiawandi Hakim, S.H., M.H.

NIP: 19720404 199601 1 001

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
Sasaran Kegiatan					
1	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
2	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	12,00	12,00
3	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan	4,00	4,00
4	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan	1,00	1,00
5	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	2,00	2,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	161.804.000,00	232.092.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	161.804.000,00	232.092.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	232.092.000,00	232.092.000,00
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	161.804.000,00	232.092.000,00
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	63.240.000,00	163.634.000,00
1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	39.908.000,00	20.946.000,00
1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	19.980.000,00	19.980.000,00
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	38.676.000,00	27.532.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		161.804.000,00	232.092.000,00

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Dr. Setiawandi Hakim, S.H., M.H.
NIP: 19720404 199601 1 001

Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran

Rohmawati, S.Ag., M.Si.
NIP: 19730613 200112 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irlan Pauji, S.H., M.A.P.

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Setiawandi Hakim, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,

Dr. Setiawandi Hakim, S.H., M.H.

NIP: 19720404 199601 1 001

Pihak Pertama,

Irlan Pauji, S.H., M.A.P.

NIP: 19830724 200812 1 002

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
Sasaran Kegiatan					
1	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
2	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	8,00	8,00
3	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	12,00	12,00
4	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan	1,00	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	377.268.000,00	233.655.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	377.268.000,00	233.655.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	233.655.000,00	233.655.000,00
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	377.268.000,00	233.655.000,00
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	296.760.000,00	187.599.000,00
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	40.236.000,00	30.336.000,00
1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	40.272.000,00	15.720.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		377.268.000,00	233.655.000,00

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Dr. Setiawandi Hakim, S.H., M.H.
NIP: 19720404 199601 1 001

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Perundang-Undangan

Irlan Pauji, S.H., M.A.P.
NIP: 19830724 200812 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amri Alam, S.STP., M.Tr.I.P.

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.M.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

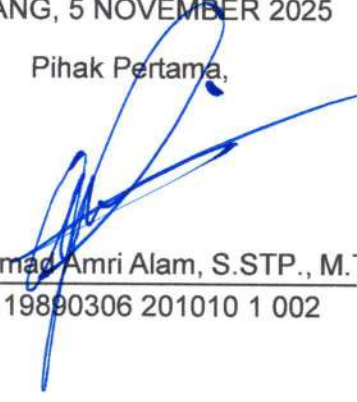
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.M
NIP: 19770607 199102 1 001


Muhammad Amri Alam, S.STP., M.Tr.I.P
NIP: 19890306 201010 1 002

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
Sasaran Kegiatan					
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
2	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan	Laporan	1,00	1,00
3	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	laporan	1,00	1,00

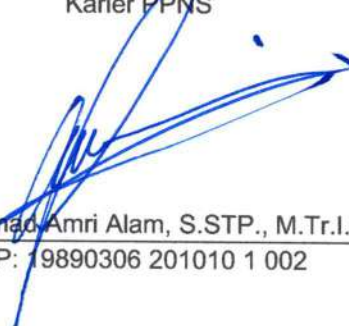
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	198.500.000,00	288.132.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	198.500.000,00	288.132.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	288.132.000,00	288.132.000,00
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	198.500.000,00	288.132.000,00
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	78.700.000,00	189.864.000,00
1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	119.800.000,00	98.268.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		198.500.000,00	288.132.000,00

Kepala Bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi



Ade Syarif Hidayatullah, S.STP., M.M.
NIP: 19770607 199102 1 001

Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS



Muhammad Amri Alam, S.STP., M.Tr.I.P.
NIP: 19890306 201010 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sayyid Wicaksono, S.H., M.Si.

Jabatan : KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.M.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS) PROVINSI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.
NIP: 19770607 199102 1 001


Sayyid Wicaksono, S.H., M.Si.
NIP: 19830624 201101 1 001

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
Sasaran Kegiatan					
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persen	100,00	100,00
Sasaran Sub Kegiatan					
2	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	1,00	1,00
3	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	3,00	3,00
4	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	laporan	1,00	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp) Sebelum Perubahan	Anggaran (Rp) Sesudah Perubahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	506.500.000,00	307.693.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	506.500.000,00	307.693.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	307.693.000,00	307.693.000,00
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	506.500.000,00	307.693.000,00
1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	216.500.000,00	144.243.000,00
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	285.000.000,00	158.450.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		506.500.000,00	307.693.000,00

Kepala Bidang Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi


Ade Syarif Hidayatullah, S.STP., M.M.
NIP: 19770607 199102 1 001

Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan


Sayyid Wicaksono, S.H., M.Si.
NIP: 19830624 201101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inu Sasongko, S.E., M.Si.

Jabatan : KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN
KEBAKARAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.M.

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,


Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.
NIP: 19770607 199102 1 001

Pihak Pertama,


Inu Sasongko, S.E., M.Si.
NIP: 19750326 200902 1 001

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan				
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persen	100,00
Sasaran Sub Kegiatan				
2	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelama	Dokumen	3,00
3	Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan L	Dokumen	1,00
4	Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	1,00
5	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupat	Orang	150,00
6	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	Dokumen	1,00
7	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	60,00
8	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1,00
9	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1,00
10	Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	laporan	1,00
11	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1,00
12	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	1,00

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
13	Tertindakannya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, P	Dokumen	1,00
14	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	Kabupaten/Kota	8,00
15	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	2,00
16	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	15,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.793.166.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.793.166.000,00
1.05	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.793.166.000,00
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	2.793.166.000,00
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	80.000.000,00
1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5.000.000,00
1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	5.000.000,00
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	300.000.000,00
1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	5.000.000,00
1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	20.000.000,00
1.05.04.1.01.0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5.000.000,00
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	5.000.000,00
1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	308.166.000,00
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	5.000.000,00
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	200.000.000,00
1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.750.000.000,00
1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	5.000.000,00
1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	50.000.000,00
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
TOTAL ANGGARAN Rp.		2.793.166.000,00

Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran


Ade Syarif Hidayatullah, S.STP., M.M.
NIP: 19770607 199102 1 001

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemetaan
Rawan Kebakaran


Inu Sasongko, S.E., M.Si.
NIP: 19750326 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iman Wahyudin, S.Sos.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.M.
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

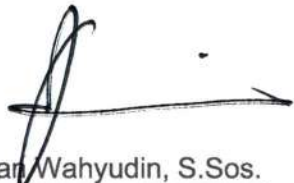
SERANG, 5 NOVEMBER 2025

Pihak Kedua,


Ade Syarief Hidayatullah, S.STP., M.

NIP: 19770607 199102 1 001

Pihak Pertama,


Iman Wahyudin, S.Sos.

NIP: 19760908 200212 1 005


No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan				
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100,00
Sasaran Sub Kegiatan				
2	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1,00
3	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Laporan	1,00
4	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100.000.000,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	100.000.000,00
1.05	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100.000.000,00
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.000.000,00
1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	40.000.000,00
1.05.04.1.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	40.000.000,00
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	20.000.000,00
TOTAL ANGGARAN Rp.		100.000.000,00

Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Kebakaran dan Penyelamatan


Ade Syarif Hidayatullah, S.STP., M.M.
NIP: 19770607 199102 1 001


Imam Wahyudin, S.Sos.
NIP: 19760908 200212 1 005